JURNAL
KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (Studi Kasus Desa Tambalang Kacamatan Sungai Pandan dan Desa Banyu Hirang Kecamatan Amuntai Selatan)

Hilma Mukimah[1], Arpandi[2] , Djayeng Turano Gunade[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email: hilmamukimah@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan sampah merupakan salah satu upaya penting dalam menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Desa Tambalang Kacamatan Sungai Pandan dan Desa Banyu Hirang Kecamatan Amuntai Selatan). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap informan yang dipilih secara *purposive sampling* berjumlah 17 orang, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah belum optimal, dari indikator penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi belum optimal karena sosialisasi belum dilaksanakan secara baik, staf kurang optimal jumlahnya masih terbatas. fasilitas belum optimal, karena banyak mengalami kerusakan sehingga menghambat kegiatan operasional, komitmen para pelaksana telah menunjukkan keseriusan menjalankan tugasnya. sikap/respon sudah optimal, pengelola memberikan sikap yang baik terhadap pelaksanaan, *standar operasional prosedur* kurang optimal, pelaksanaannya masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, indikator koordinasi belum optimal, perlunya penguatan agar pengelolaan dapat bejalan lebih baik. faktor pendukung, adanya kesungguhan dan tanggung jawab, adanya pedoman dan dasar hukum sebagai acuan dalam pelaksanaan. Faktor penghambat, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, keterbatasan anggaran, kultur budaya masyarakat, kurangnya kerja sama yang kuat antar pihak.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah.

ABSTRACT

Waste management is one of the important efforts in maintaining environmental cleanliness and improving the quality of life of the community. This study aims to analyze the implementation of the Regional Regulation of Hulu Sungai Utara Regency Number 16 of 2013 concerning Waste Management (Case Study of Tambalang Village, Sungai Pandan District and Banyu Hirang Village, South Amuntai District). The study uses a qualitative approach with a descriptive type. Data were collected through observation, interviews, and documentation of informants selected by purposive sampling totaling 17 people, then analyzed through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the implementation of the Regional Regulation on Waste Management is not optimal, from the indicators of information delivery, information clarity and consistency are not optimal because socialization has not been carried out properly, the number of staff is less than optimal and is still limited. facilities are not optimal, because many are damaged so that they hamper operational activities, the commitment of the implementers has shown seriousness in carrying out their duties. attitudes/responses are optimal, managers provide a good attitude towards implementation, standard operating procedures are less than optimal, the implementation is still not fully in accordance with applicable provisions, coordination indicators are not optimal, the need for strengthening so that management can run better. Supporting factors

include sincerity and responsibility, and guidelines and a legal basis as a reference for implementation. Inhibiting factors include low public awareness and participation, budget constraints, community culture, and a lack of strong cooperation between parties.

Keywords: *Policy Implementation, Waste Management, Regional Regulation.*

PENDAHULUAN

Persoalan sampah hingga saat ini masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pengelolaan lingkungan. Peningkatan jumlah penduduk, perkembangan aktivitas ekonomi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan volume sampah terus bertambah dari waktu ke waktu. Apabila tidak dikelola secara tepat, penumpukan sampah berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, menurunkan kualitas kesehatan masyarakat, serta mengganggu kenyamanan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan sampah yang terencana, berkelanjutan, dan melibatkan berbagai pihak. Kondisi pengelolaan sampah di setiap daerah juga berbeda-beda karena dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, sarana dan prasarana, serta tingkat partisipasi masyarakat.

Landasan hukum pengelolaan sampah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melaksanakan pengelolaan sampah secara terpadu melalui upaya pengurangan dan penanganan sampah. Selain itu, peraturan tersebut juga menegaskan pentingnya penerapan prinsip *Reduce, Reuse, dan Recycle* (3R), sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan.

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menetapkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan daerah ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan menyesuaikan karakteristik, kebutuhan, dan kondisi daerah. Melalui kebijakan tersebut diharapkan tercipta sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, meningkatkan kualitas lingkungan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan.

Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusannya, tetapi juga sangat bergantung pada proses implementasi di lapangan. Implementasi merupakan tahapan yang menentukan apakah tujuan kebijakan dapat diwujudkan melalui tindakan nyata sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang menitikberatkan pada empat aspek utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut saling berkaitan dalam memengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan publik.

TPS 3R Desa Tambalang dan TPS 3R Desa Banyu Hirang merupakan bentuk pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah berbasis 3R di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Meskipun demikian, hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Di Desa Tambalang belum pernah dilaksanakan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah berbasis 3R kepada masyarakat sehingga masih ditemukan kebiasaan membuang sampah ke sungai. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana menyebabkan proses pemilahan sampah diperlukan tenaga yang besar dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Koordinasi antara pemerintah desa dengan pengelola TPS 3R juga belum berlangsung secara optimal. Sementara itu,

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

di Desa Banyu Hirang ketersediaan tenaga kerjamasih belum mencukupi dibandingkan denganbanyaknya volume sampah yang perlu dikelola. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sedangkan beberapa fasilitas operasional mengalami kerusakan sehingga belum mampu mendukung kegiatan pengelolaan sampah secara maksimal. Berbagai kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih memerlukan perhatian agar tujuan pengelolaan sampah dapat tercapai secara optimal

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian yang dilakukan oleh Widia Putri (2023) mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 di Kecamatan Haur Gading menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum berjalan optimal akibat rendahnya partisipasi masyarakat, terbatasnya sosialisasi, serta kurang memadainya sumber daya dan fasilitas. Penelitian Supihadi (2022) mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Balangan juga menunjukkan bahwa komunikasi, sumber daya, dan koordinasi merupakan faktor penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasi kebijakan di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah(Studi Kasus Desa Tambalang Kacamatan Sungai Pandan dan Desa Banyu Hirang Kecamatan Amuntai Selatan), sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, pendekatan tersebut dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah pada TPS 3R Desa Tambalang Kecamatan Sungai Pandan dan TPS 3R Desa Banyu Hirang Kecamatan Amuntai Selatan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2023). Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai pelaksanaan pengelolaan sampah di lokasi penelitian. Wawancara dilakukan kepada para informan guna memperoleh informasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah, sedangkan dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa dokumen, arsip, maupun foto kegiatan. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, jumlah informan yang dilibatkan sebanyak 17 orang. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis melalui tiga tahap, yaitu proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Hardani, 2023). Untuk menjamin keabsahan data dilakukan uji kreadibilitas data dengan cara perpanjang pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, analisa khusus negatif, bahan referensi dan *member check.*

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Desa Tambalang Kacamatan Sungai Pandan dan Desa Banyu Hirang Kecamatan Amuntai Selatan)

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

karena menjadi proses penerapan kebijakan yang telah ditetapkan ke dalam tindakan nyata. Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada proses perumusannya, tetapi juga ditentukan oleh sejauh mana kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif sehingga tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai. Dalam penelitian ini, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah menjadi fokus kajian karena peraturan tersebut menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Peraturan daerah tersebut mengatur berbagai aspek pengelolaan sampah, mulai dari upaya pengurangan, penanganan, pengangkutan, hingga pemrosesan akhir sampah. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sarana dan prasarana pendukung, melakukan pembinaan, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dengan demikian, penerapan peraturan daerah ini tidak hanya bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, tetapi juga mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan melalui pengelolaan lingkungan yang lebih baik.

1. Komunikasi

   Komunikasi adalah proses saling menyampaikan serta bertukar informasi, gagasan, maupun pesan antara individu maupun kelompok untuk menciptakan pemahaman yang sama. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan, komunikasi berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi secara jelas sehingga pihak-pihak yang terlibat dapat memahami tujuan serta melaksanakan kebijakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

   a. Penyampaian Informasi

      Penyampaian informasi adalah proses menyalurkan pesan atau pengetahuan dari pemberi informasi kepada penerima melalui berbagai cara atau media komunikasi. Penyampaian informasi yang efektif memungkinkan pesan diterima, dipahami, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil tindakan atau melaksanakan suatu kegiatan.

      Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi diketahui bahwa Penyampaian informasi keseluruhan masih belum optimal. Di Desa Tambalang, informasi belum disampaikan langsung kepada masyarakat karena belum pernah diadakan sosialisasi. Akibatnya, banyak masyarakat yang belum mengetahui cara pengelolaan sampah yang baik dan benar. Sementara itu, di Desa Banyu Hirang sosialisasi sudah pernah dilakukan, tetapi masih terbatas sehingga tidak semua masyarakat memperoleh informasi. Oleh karena itu, penyampaian informasi masih perlu ditingkatkan agar seluruh masyarakat memahami pentingnya pengelolaan sampah dan dapat berpartisipasi dalam pelaksanaannya.

   b. Kejelasan Informasi

      Kejelasan informasi menunjukkan tingkat kemudahan suatu informasi untuk dipahami oleh penerima. Informasi yang disampaikan harus menggunakan bahasa yang jelas, sistematis, lengkap, dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda sehingga tujuan komunikasi dapat tercapai dengan baik.

      Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi Kejelasan informasi mengenai pengelolaan sampah juga masih belum optimal. Di Desa Tambalang, masyarakat belum mendapatkan penjelasan secara langsung sehingga masih banyak yang belum memahami tata cara pengelolaan sampah. Di Desa Banyu Hirang, informasi yang diberikan sudah lebih jelas, tetapi belum dipahami secara merata oleh seluruh

masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlunya penyampaian informasi yang lebih rinci, sehingga tidak muncul kesenjangan pemahaman di masyarakat.

c. Konsistensi

Konsistensi merupakan keadaan ketika penyampaian informasi maupun pelaksanaan suatu kegiatan dilakukan secara tetap, berkesinambungan, dan tidak berubah-ubah. Konsistensi diperlukan agar kebijakan dapat diterapkan secara stabil, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, konsistensi dalam penyampaian informasi dan pelaksanaan sosialisasi masih belum optimal. Di Desa Tambalang belum pernah dilakukan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat. Sementara itu, di Desa Banyu Hirang sosialisasi hanya dilakukan satu kali dan belum dilanjutkan secara berkala. Kondisi ini menyebabkan masyarakat tidak memperoleh informasi secara terus-menerus sehingga kesadaran untuk mengelola sampah dengan baik belum meningkat secara maksimal.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan seluruh potensi yang dimiliki organisasi, baik berupa sumber daya manusia, sarana, prasarana, maupun fasilitas lainnya yang dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan suatu kebijakan atau program. Ketersediaan sumber daya yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

a. Staf

Staf merupakan sumber daya manusia yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan berbagai kegiatan operasional organisasi. Keberadaan staf yang memiliki jumlah dan kompetensi yang memadai akan mendukung efektivitas pelaksanaan program serta pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di kedua desa, dapat disimpulkan bahwa sumber daya staf dalam pengelolaan sampah kurang optimal. Di Desa Tambalang jumlah petugas masih cukup untuk menjalankan kegiatan pengelolaan sampah, meskipun masih terdapat beberapa keterbatasan. Namun, di Desa Banyu Hirang jumlah petugas masih kurang sehingga pekerjaan menjadi lebih berat dan pelaksanaan pengelolaan sampah belum dapat dilakukan secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan penambahan tenaga kerja agar kegiatan pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif.

b. Fasilitas

Fasilitas merupakan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan suatu kegiatan. Ketersediaan fasilitas yang memadai akan membantu memperlancar proses kerja, meningkatkan efisiensi pelaksanaan program, serta mendukung tercapainya hasil yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di TPS 3R Desa Tambalang dan Desa Banyu Hirang, dapat disimpulkan bahwa fasilitas di kedua desa masih belum optimal. Di Desa Tambalang masih terdapat kekurangan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional TPS 3R. Sementara itu, di Desa Banyu Hirang beberapa fasilitas mengalami kerusakan sehingga tidak dapat digunakan secara maksimal. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengelolaan sampah belum

berjalan secara optimal dan masih memerlukan perbaikan serta penambahan fasilitas.

3. Disposisi

Disposisi merupakan sikap, komitmen, serta kesediaan para pelaksana dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Disposisi yang baik mencerminkan adanya tanggung jawab, dedikasi, dan kemauan pelaksana untuk melaksanakan kebijakan secara optimal.

a. Komitmen

Komitmen merupakan kesungguhan dan tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya. Komitmen tercermin dari kesediaan untuk tetap menjalankan pekerjaan secara konsisten, disiplin, dan penuh tanggung jawab meskipun menghadapi berbagai kendala.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada TPS 3R Desa Tambalang dan Desa Banyu Hirang, dapat disimpulkan bahwa komitmen para pelaksana dalam menjalankan pengelolaan sampah sudah optimal. Pemerintah desa, pengelola TPS 3R, dan petugas tetap berusaha menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik meskipun masih menghadapi berbagai kendala. Kesungguhan dan tanggung jawab yang ditunjukkan para pelaksana menjadi salah satu faktor yang mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah di kedua desa.

b. Sikap/Respon

Sikap atau respon adalah bentuk tanggapan yang ditunjukkan individu terhadap suatu kebijakan, program, maupun situasi tertentu. Sikap yang positif akan mendorong pelaksana untuk menerima, mendukung, dan berupaya menyukseskan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada TPS 3R Desa Tambalang dan Desa Banyu Hirang, dapat disimpulkan bahwa sikap atau respon para pelaksana terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah sudah optimal. Pemerintah desa dan pengelola TPS 3R menunjukkan sikap yang baik serta mendukung pelaksanaan program pengelolaan sampah. Selain itu, mereka juga bersedia menerima masukan dan berusaha mencari solusi terhadap berbagai kendala yang dihadapi. Sikap yang positif tersebut membantu pelaksanaan pengelolaan sampah tetap berjalan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah tatanan organisasi yang mengelola pembagian tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta hubungan kerja antarunit dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Struktur birokrasi yang jelas akan mempermudah koordinasi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan, dan mengurangi terjadinya tumpang tindih tugas.

a. SOP

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman tertulis yang memuat tahapan atau tata cara pelaksanaan suatu pekerjaan agar setiap kegiatan dilakukan secara seragam, sistematis, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi pada TPS 3R Desa Tambalang dan Desa Banyu Hirang penerapan SOP kurang optimal. pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masih ada beberapa kegiatan yang belum dilakukan secara konsisten sesuai SOP, sehingga pelaksanaan pengelolaan sampah belum berjalan secara maksimal.

b. Koordinasi

Koordinasi adalah proses menyelaraskan komunikasi, tugas, dan tanggung jawab di antara berbagai pihak yang terlibat agar pelaksanaan kegiatan berlangsung secara terpadu. Koordinasi yang baik akan memperkuat kerja sama, menghindari kesalahpahaman, serta meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa koordinasi antara pemerintah desa, pengelola TPS 3R, dan pihak terkait masih belum optimal. Di Desa Tambalang koordinasi antar pihak masih kurang sehingga beberapa kegiatan pengelolaan sampah belum berjalan dengan baik. Di Desa Banyu Hirang koordinasi sudah dilakukan, tetapi belum berlangsung secara rutin dan belum melibatkan semua pihak secara maksimal. Oleh karena itu, koordinasi perlu ditingkatkan agar kerja sama antar pihak menjadi lebih baik dan pelaksanaan pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif..

B. Faktor-Faktor yang Mempengeruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Desa Tambalang Kacamatan Sungai Pandan dan Desa Banyu Hirang Kecamatan Amuntai Selatan)

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor tersebut menentukan apakah tujuan kebijakan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Secara umum penentu hasil atau perubahan tersebut ada dua yaitu, faktor pendukung dan faktor penghambat.

1. Faktor pendukung

Faktor pendukung merupakan segala kondisi atau unsur yang memberikan kontribusi positif terhadap keberhasilan pelaksanaan suatu program atau kebijakan. Keberadaan faktor pendukung dapat memperlancar proses pelaksanaan, meningkatkan efektivitas kegiatan, serta membantu tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

a. Adanya Kesungguhan dan Tanggung Jawab

Salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan suatu organisasi atau kegiatan, pengelola menjalankan tugasnya dengan serius, teliti, disiplin dan penuh tanggung jawab, dengan kedua sikap tersebut pengelolaan dapat berjalan lebih tertata dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optmal.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa tingginya komitmen dan tanggung jawab pengelola menjadi faktor pendukung dalam pengelolaan sampah di TPS 3R Desa Tambalang dan Desa Banyu Hirang. Kesungguhan tersebut terlihat dari upaya pengelola untuk tetap menjalankan kegiatan pengelolaan sampah secara rutin meskipun menghadapi berbagai kendala di lapangan.

b. Adanya Pedoman dan Dasar Hukum sebagai Acuan dalam pelaksanaan

Aturan utama yang menjadi pondasi suatu kebijakan, pedoman menjadi petunjuk atau langakah kerja yang harus diikuti, keduanya memastikan setiap tindakan, keputusan, dan penjelasan panjang yang dibuat sah, terarah, dan adil bagi semua orang.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa adanya pedoman dan dasar hukum menjadi salah satu faktor pendukung dalam pengelolaan sampah di TPS 3R Desa Tambalang dan Desa Banyu Hirang. Keberadaan peraturan dan pedoman kerja memberikan arah serta acuan yang jelas bagi pemerintah

desa dan pengelola TPS 3R dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah. Dengan adanya dasar hukum tersebut, pelaksanaan pengelolaan sampah memiliki landasan yang jelas sehingga sehingga dapat mendukung keberlangsungan program pengelolaan sampah.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah berbagai kondisi atau kendala yang dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan maupun program. Hambatan tersebut dapat berasal dari aspek sumber daya, partisipasi masyarakat, koordinasi, maupun faktor lainnya yang menyebabkan tujuan kebijakan belum dapat diwujudkan secara optimal.

a. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat

Faktor penghambat utama dalam keberhasilan suatu program atau pembangunan. Kesadaran yang rendah membuat masyarakat kurang memahami pentingnya kegiatan tersebut, sehingga mereka bersikap acuh tak acuh dan tidak merasa memiliki tanggung jawab bersama. Akibatnya, partisipasi masyarakat juga menjadi minim, baik dalam bentuk tenaga, pikiran, maupun dukungan sumber daya. Kondisi ini menyebabkan program sulit berjalan optimal, tujuan sulit tercapai, dan keberlanjutan kegiatan menjadi lemah karena semua beban hanya ditanggung oleh pihak pengelola saja.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan sampah. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, belum terbiasanya masyarakat melakukan pemilahan sampah, serta rendahnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung kegiatan pengelolaan sampah menyebabkan pelaksanaan pengelolaan sampah di kedua desa belum berjalan secara optimal.

b. Keterbatasan Anggaran dalam Mendukung Kegiatan Pengelolaan

Dana yang tersedia lebih kecil dari pada jumlah kebutuhan atau keinginan yang harus dipenuhi. Akibatnya, banyak rencana kerja tidak dapat terlaksana secara optimal, kegiatan terpaksa dipangkas, dan mutu pengelolaan menjadi kurang maksimal. Dengan kondisi tersebut, tujuan yang telah ditetapkan akan lebih sulit tercapai karena pengelolaan tidak didukung oleh dana yang cukup. Hal ini menuntut individu, perusahaan, maupun pemerintah untuk membuat prioritas yang ketat agar pemanfaatan uang tetap terjaga.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di TPS 3R Desa Tambalang dan Desa Banyu Hirang, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan sampah. Keterbatasan dana berdampak pada pemenuhan kebutuhan operasional, perawatan fasilitas, penyediaan sarana pendukung, dan pengembangan kegiatan pengelolaan sampah. Akibatnya, pelaksanaan pengelolaan sampah di kedua TPS 3R belum dapat berjalan secara optimal dan masih memerlukan dukungan anggaran yang lebih memadai.

c. Kultur Budaya Masyarakat

Kebiasaan atau perilaku membuang sampah tanpa memilah, hal ini dipengaruhi oleh kebiasaan lama yang menganggap sampah sabagai barang sisa yang harus segera dibuang jauh dari rumah. Kurangnya budaya 3R dalam pengelolaan sampah menyababkan volume sampah terus meningkat. Oleh karena itu kehadiran TPS 3R

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

bukan hanya membutuhkan fasilitas, tetapi juga erubahan kultur budaya masyarakat agar mau memilah sampah dari sumbernya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat diketahui bahwa kultur budaya masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat dalam implementasi pengelolaan sampah melalui TPS 3R di Desa Tambalang dan Desa Banyu Hirang. Permasalahan utama terletak pada kebiasaan masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, rendahnya kesadaran untuk memilah sampah dari rumah, serta anggapan bahwa pengelolaan sampah hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas TPS 3R.

d. Kurangnya Kerja Sama yang Kuat antara Pihak yang Terlibat

Hal ini sering terjadi dikarenakan tidak adanya komunikasi yang efektif, tujuan yag tidak selaras, serta hilangnya rasa saling percaya, menyababkan kesalahapahaman, konflik, serta penundaan proyek. Akibatnya, pelaksanaan program menjadi lambat, tidak efektif, dan sumber daya yang ada tidak dimanfaatkan secara optimal. Kerja sama yang lemah juga membuat tanggung jawab menjadi kabur sehingga keberhasilan sulit diwujudkan secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di TPS 3R Desa Tambalang dan Desa Banyu Hirang, dapat disimpulkan bahwa kurangnya kerja sama menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan sampah. Kurangnya kerjasama yang baik menyebabkan informasi tidak tersampaikan secara merata, dan mengakibatkan pelaksanaan pengelolaan sampah belum didukung secara maksimal oleh seluruh pihak yang terlibat.

SIMPULAN

Hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah pada TPS 3R Desa Tambalang Kecamatan Sungai Pandan dan TPS 3R Desa Banyu Hirang Kecamatan Amuntai Selatan menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut masih belum optimal. Berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, kondisi tersebut terlihat pada empat subvariabel yang dianalisis. Pada subvariabel komunikasi, penyampaian informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi pelaksanaan sosialisasi masih belum berjalan secara optimal. Informasi mengenai pengelolaan sampah belum diterima secara merata oleh masyarakat sehingga pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah masih perlu ditingkatkan. Pada subvariabel sumber daya, jumlah staf yang tersedia belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah. Selain itu, kondisi sarana dan prasarana juga masih belum memadai karena beberapa fasilitas mengalami kerusakan yang berdampak pada terhambatnya kegiatan operasional TPS 3R. Pada subvariabel disposisi, komitmen para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sudah menunjukkan hasil yang baik. Demikian pula sikap dan respons pemerintah desa serta pengelola TPS 3R yang mendukung pelaksanaan program pengelolaan sampah dan berupaya mengatasi berbagai kendala yang dihadapi. Selanjutnya, pada subvariabel struktur birokrasi, penerapan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) masih belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di samping itu, koordinasi antara pemerintah desa, pengelola TPS 3R, Dinas Lingkungan Hidup, dan pihak terkait lainnya masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan pengelolaan sampah dapat berlangsung lebih efektif.

Faktor-faktor pendukung dalam pengelolaan sampah meliput: pertama, adanya kesungguhan dan tanggung jawab, kesungguhan pengelola terlihat dari upaya mereka untuk tetap menjalankan kegiatan pengangkutan, pemilahan, dan pengolahan sampah secara rutin meskipun menghadapi berbagai keterbatasan. Kedua, adanya pedoman dan dasar hukum sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 dan pedoman kerja yang digunakan oleh pengelola TPS 3R memberikan arah dan landasan yang jelas dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Faktor-faktor penghambat : Pertama, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, terlihat dari masih adanya masyarakat yang belum melakukan pemilahan sampah dan kurang aktif dalam mendukung kegiatan pengelolaan. Kedua, keterbatasan anggaran, menyebabkan beberapa kebutuhan operasional, pemeliharaan fasilitas, dan penyediaan sarana pendukung belum dapat terpenuhi secara maksimal. Ketiga, kultur budaya masyarakat, karena kebiasaan dan pola perilaku masyarakat yang sudah di terapkan sejak awal. Keempat, kurangnya kerja sama yang kuat antar pihak, kurangnya kerja sama antara Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah desa, pengelola, dan masyarakat juga berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan sampah.

Saran yang dapat diberikan peneliti Kepada Bidang Kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup dapat meningkatkan pembinaan, pendampingan, dan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah. Selain itu, perlu memberikan perhatian yang lebih besar terhadap berbagai kebutuhan yang menunjang pelaksanaan kegiatan di lapangan sehingga berbagai kendala yang dihadapi pengelola dapat diminimalkan. Kepada Pemerintah Desa, dapat lebih aktif dalam menggerakkan masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung kegiatan pengelolaan sampah yang telah dilaksanakan. Kepada masyarakat lebih dapat meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dengan mendukung setiap kegiatan pengelolaan sampah yang dilaksanakan di desa. Keterlibatan masyarakat sangat penting karena keberhasilan pengelolaan sampah tidak dapat dicapai apabila hanya mengandalkan pemerintah desa dan pengelola TPS 3R saja.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. (2013). *Peraturan Daerah (Perda) No. 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.*

Anonim. (2008). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.*

Affrian, R. (2023). *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.

Agustino, L. (2019). *Dasar-Dsar Kebijakan Publik.* Bandung: CV. Alfabeta.

Alaslan, A. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualtatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.

Haryoko, S. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep,Teknik, & Prosedur Analisis).* Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri.

Rodiyah, I. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Sidoarjo: Umsida Press.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kebijakan*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.